

Daftar Pustaka

A. Buku-buku.

- Acep Saifullah: Narkotika Dalam Prespektif Hukum Islam Dan positif
- Andi Zainal Abidin Farid. 1983. *Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta : Liberty.
- Amir Ilyas dan Haeranah, dkk. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Yogyakarta : Rangkang Education.
- Arinanto Satya dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Kontruksi Sampai Implementasi*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2001
- Barda Arief Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2013,
- Doyle Paul, *Teori sosiologi klasik dan modern*, jilid I dan II, ahli bahasa,: Robert M.Z. Lawang, Jakarta, gramedia, 1986
- E.Y Kanter & S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika.
- Hartono Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 2001.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian hukum edisi Revisi*, Kencana Prenada Media group, Jakarta, 2013
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara,
- Mokhammad Najih. 2014. *Politik Hukum Pidana*. Malang: Setara Press
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Teguh Prasetyo, SH, M.Si. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit Nusa Media
- Rahardjo Satjipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000,

Rasjidi Lili dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya, Bandung, 2003

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta: Putra Bardin, 1996

Rusli Effendy. 1978. Asas-asas Hukum Pidana. Ujung Pandang : LEPPEN-UMI.

Shant Delyana, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988

Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Sudikno Mertokusumo. 1993. Hukum Pembuktian. Bandung : Dunia Ilmu.

Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya. 2014. Moralitas Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing.

W.Friedman, Legal Theory, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan . 1994, Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II), Jakarta. Raja Grafindo Persada,Cetakan Kedua

B. Kamus

Pusat Bahasa,Kementrian pendidikan Nasional, 2008, kamus Besar bahasa Indonesia, gamedia pustaka utama, Jakarta

C. Jurnal

Buku Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Petugas Lapas Dan Rutan, Hlm1, diambil dari situs resmi BNN

Fence M. Wantu. 2012. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan DanKemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata.JurnalDinamika HukumVol. 12 No. 3 September 2012.

John Kenedi. 2017. Kebijakan kriminal (criminal policy) dalam negara hukum indonesia: upaya mensejahterakan masyarakat (social welfare). Bengkulu. Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam.

- Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Jakarta 8 Januari 2009
- Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
- Vol 2 No. 1. Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana IAIN Bengku. Hlm. 23.
- Tozilnutpam, Praverb Dot Net dan Agung Pramono, 2016, Jangan Ada Sentimen, Legal Trust, trust.blogspot.com/2016/05/jangan-ada-sentimen.html
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, “Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi”, cet. 1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013)
- Soetandyo Wignjosoebroto, Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang Tidak Memihak, Sebuah risalah ringkas, dimaksudkan untuk rujukan ceramah dan diskusi tentang “Kriteria dan Pengertian Hakim Dalam Perspektif Filosofis, Sosiologis dan Yuridis” yang diselenggarakan dalam rangka Seminar Nasional bertema “Problem Pengawasan Penegakan Hukum di Indonesia” diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan PBNU-LPBHNU di Jakarta, 8 September 2006.

D. peraturan perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER - 009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Nomor:038/A/JA/12/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung R.I NOMOR: PER-069/A/JA/07/2007 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pnyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan R.I

E. Internet

uu_28_2014_www.hukumonline.com.

etika & plagisrisme, staffnew.uny.ac.id

LBH Perjuangan, Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, KepastianHukum Dan Kemanfaatan (Studi Kasus : Kasus MbahMinah).<http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>

Yance Arizona, Apa Itu Kepastian Hukum. Yance Arizona, Apa Itu Kepastian Hukum. <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>

<http://www.surabayapagi.com/index.php?5ab4b8c384a5a7fc023444849ae9746c4fd50a1c85485ea76ed077341cd654fb>, diakses tanggal 22 September 2022pukul 17.45 WIB

<http://www.surabayapagi.com/index.php?5ab4b8c384a5a7fc023444849ae9746c4fd50a1c85485ea76ed077341cd654fb>

Ngobrolinhukum, Memahami Kepastian dalam Hukum. <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>